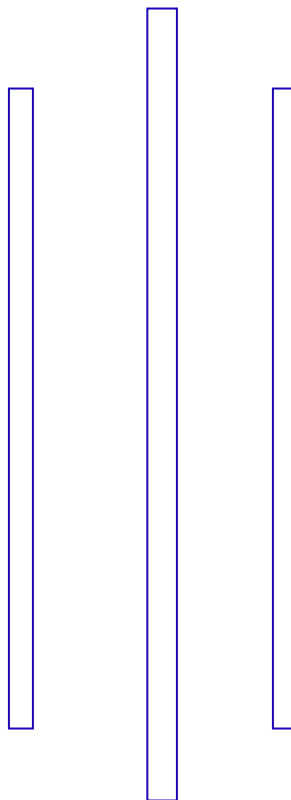




**KEPUTUSAN KEPALA DESA PAKUNCEN
NOMOR : 050/ 073/ 2009/ III/ 2010**

TENTANG

**RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DESA (RKPDesa)
DESA PAKUNCEN TAHUN 2010**



DESA : PAKUNCEN
KECAMATAN : SELOMERTO
KABUPATEN : WONOSOBO



**PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO
KECAMATAN SELOMERTO
KEPALA DESA PAKUNCEN**

Kode pos 56361

Pakuncen, 31 Maret 2010

Nomor : 050/ 073/ 2009/ III/ 2010
Sifat : Penting
Lampiran : 1 bendel
Perihal : Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDesa)
Tahun 2010

Kepada.

Yth. BUPATI WONOSOBO
Cq
CAMAT SELOMERTO

Di
SELOMERTO

Bersama ini, Kami sampaikan Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP Desa)
Desa Pakuncen Kecamatan Selomerto Kabupaten Wonosobo Tahun 2010 yang meliputi
sbb;

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

1. VISI DAN MISI DESA
 - a. Visi Desa.
 - b. Misi Desa
2. GAMBARAN UMUM DESA
 - a. Kondisi Geografis
 - b. Kondisi Demografis
 - c. Pemerintahan Desa.
 - d. Kondisi Sosial
 - e. Kondisi Ekonomi.
3. PERMASALAHAN DESA
 - a. Kesehatan
 - b. Pendidikan
 - c. Ketenagakerjaan
 - d. Industri Rumah Tangga dan Industri Kecil.
 - e. Sektor Pertanian
 - f. Infrastruktur
 - g. Permasalahan Lingkungan Hidup
 - h. Penyelenggaraan Pemerintahan

B. STRATEGI PEMBAGUNAN DESA

C. MAKSUD DAN TUJUAN PENYUSUNAN RKP DESA

D. SISTEMATIKA PEYUSUNAN RKP DESA

BAB II KERANGKA ANGGARAN DESA

A ANGGARAN DESA TAHUN BERJALAN

1. Pendapatan Desa
2. Belanja Desa .
3. Pembiayaan Desa.

B PAGU ANGGARAN

1. Pagu Indikatif Anggaran Pendapatan Desa
2. Pagu Indikatif Anggaran Belanja Desa

C NORMA, PRINSIP ANGGARAN DESA

1. Norma Anggaran
2. Prinsip Anggaran

BAB III PRIORITAS PEMBAGUNAN DESA

1. Penanganan Kemiskinan
2. Pengembangan Ekonomi Rakyat
3. Pembangunan Infrastruktur
4. Penyelenggaraan Pemerintah

BAB IV RENCANA KERJA DAN BIAYA

- A. RKP Desa Pakuncen Tahun 2010 (APBDesa)
- B. RKP Desa Pakuncen Tahun 2010 (APBD Kabupaten)
- C. RKP Desa Pakuncen tahun 2010 (APBD Provinsi dan APBN)
- D. RKP Desa Pakuncen tahun 2010 (Swadaya Masyarakat)

BAB V PENUTUP

Demikian dari kami untuk menjadikan perhatian dan terima kasih

Kepala Desa Pakuncen

MALNO



PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO
KECAMATAN SELOMERTO
DESA PAKUNCEN

Kode pos 56361

KEPUTUSAN KEPALA DESA PAKUNCEN
NOMOR : 050/ 073/ 2009/ III/ 2010

TENTANG

RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DESA (RKP DESA)
DESA PAKUNCEN TAHUN 2010

KEPALA DESA PAKUNCEN

- Menimbang** : a. bahwa untuk mengarahkan dan menselaraskan perencanaan, pelaksanaan serta monitoring dan evaluasi pembangunan desa sebagaimana diamanatkan oleh pasal 63 Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2005 tentang Desa, dipandang perlu disusun Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP Desa);
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a di atas dipandang perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP Desa) Desa Pakuncen tahun 2010.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Desa-Desa Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 35851);
3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Desa menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Lembaran Desa Kabupaten Wonosobo Tahun 2006 Nomor 9 Seri E Nomor 6);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 10 Tahun 2006 tentang Sumber Pendapatan Desa (Lembaran Desa Kabupaten Wonosobo Tahun 2006 Nomor 11 Seri E Nomor 8);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 11 Tahun 2006 tentang Alokasi Dana Desa (Lembaran Desa Kabupaten Wonosobo Tahun 2006 Nomor 12 Seri E Nomor 9
14. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor ... Tahun 2008 tentang Perencanaan Pembangunan Desa (Lembaran Desa Kabupaten Wonosobo Tahun 2008 Nomor Seri ... Nomor

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DESA TENTANG RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DESA (RKPDesa) DESA PAKUNCEN TAHUN 2010

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Desa adalah Desa Pakuncen
2. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah desa dan badan permusyawaratan desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat isitiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia
3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa
4. Kepala Desa adalah Pimpinan Pemerintah Desa;
5. Perangkat Desa adalah Unsur Pemerintah Desa yang terdiri dari Sekretaris Desa dan perangkat desa lainnya ;
6. Sekretariat Desa adalah unsur pelayan administrasi desa yaitu Kepala Urusan;
7. Pelaksana Teknis adalah pelaksana teknis yang melaksanakan tugas lapangan tertentu di Desa;
8. Unsur kewilayahan adalah unsur pembantu Kepala Desa di wilayah bagian Desa yaitu Kepala Dusun;
9. Badan Permusyawaratan Desa, yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa;
10. Musyawarah Perencanaan Pembangunan desa, yang selanjutnya di singkat Musrenbangdes adalah suatu forum untuk merencanakan kegiatan pembangunan desa;
11. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, yang selanjutnya disingkat RPJMDesa adalah dokumen perencanaan pembangunan desa selama 5 (lima) tahun disesuaikan dengan RPJMD Kabupaten dan sebagai acuan dalam penyusunan RKP Desa
12. Rencana Kerja Pembangunan Desa, yang selanjutnya disingkat RKP Desa adalah suatu dokumen perencanaan pembangunan desa selama 1 (satu) tahun sebagai pedoman dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
13. Dusun adalah bagian wilayah dalam Desa yang merupakan lingkungan kerja pelaksanaan Pemerintahan Desa.

BAB II

SISTEMATIKA

Pasal 2

(1). RKP Desa, Desa Pakuncen Tahun 2010 disusun dengan Sistematika sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN
BAB II : KERANGKA ANGGARAN DESA
BAB III : PRIORITAS PEMBAGUNAN DESA
BAB IV : RENCANA KERJA DAN BIAYA
BAB V : PENUTUP

(2). RKP Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) digunakan sebagai acuan dan Dasar penyusunan APB Desa Tahun 2010

Pasal 3

Isi, uraian dan rincian RKP Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Desa ini.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Keputusan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Pakuncen
Pada tanggal 31 Maret 2010

KEPALA DESA PAKUNCEN

(M A L N O)

BAB I
P E N D A H U L U A N

A. LATAR BELAKANG

1. VISI DAN MISI

- a. VISI : Mewujudkan kesejahteraan masyarakat desa dengan meningkatkan pembangunan dan perekonomian masyarakat
- b. MISI : 1. Meningkatkan kinerja lembaga pemerintahan desa yang ada;
2. Meningkatkan pembangunan dan perekonomian masyarakat dengan basis partisipasi masyarakat
3. Meningkatkan terjalinnya hubungan yang harmonis antar lembaga pemerintahan desa yang ada dengan masyarakat

1. GAMBARAN UMUM DESA

a). KONDISI GEOGRAFIS

- a. Letak Geografis Desa
Desa Terletak pada ketinggian ± 460 M diatas permukaan laut, sedangkan Kondisi topografinya dataran sedang, suhu udara rata-rata $24^{\circ}\text{C} - 30^{\circ}\text{C}$, dalam satu desa terdiri dari 2 (dua) dusun yaitu dusun Pakuncen terbagi dalam 6 RT dan 1 RW, dan dusun Krotok terbagi dalam 4 RT dan 1 RW, secara global yaitu terdiri dari 2 dusun , 2 RW dan 10 RT. jarak desa dengan ibu kota Kecamatan $\pm 1,5$ Km dan dari Ibu Kota Kabupaten ± 7 Km.

b. Luas Wilayah

No	Kondisi Wilayah	Luas (Ha)	Prosentase
1	2	3	4
1.	Lahan Sawah	62,556	82,141 %
a.	Irigasi Teknis	-	0 %
b.	Irigasi $\frac{1}{2}$ Teknis	10,531	13,828 %
c.	Irigasi Sederhana	52,025	68,313 %
d.	Tadah Hujan	-	0 %
2.	Lahan Kering	13,600	17,858 %
a.	Pekarangan dan Bangunan	5,658	7,429 %
b.	Tegalan / Kebun	2,022	2,655 %
c.	Padang Gembala	-	0 %
d.	Kolam / Tambak	0,975	1,280 %
e.	Hutan Negara	-	0 %
f.	Lain-lain (jln, sungai dll)	4,945	6,493 %
J u m l a h		76,156	100 %

- c. Batas Wilayah
- ✓ Sebelah Barat : Sungai serayu (Dusun Wonokasih)
 - ✓ Sebelah Utara : Sawah (Desa Kalierang)
 - ✓ Sebelah Timur : Jalan Desa (Kelurahan Selomerto)
 - ✓ Sebelah Selatan : Sawah (Desa Gunungtawang)

b). KONDISI DEMOGRAFIS

a. Perkembangan Penduduk

N o	Dusun	Jml Penduduk Akhir Tahun 2008			Jumlah Perkembangan Penduduk								Jml Penduduk Akhir Tahun 2009		
		L	P	Jumlah	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	Jumlah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Pakuncen	417	436	853	9	12	3	4	1	5	20	7	404	442	846
2	Krotok	229	248	477	4	5	1	5	6	7	1	4	237	251	488
Jumlah		646	684	1330	13	17	4	9	7	12	22	11	641	693	1334

b. Jumlah Penduduk dirinci Menurut Mata Pencapaian

No	Mata Pencapaian	Jumlah Penduduk Per Dusun		Jumlah	Prosentase
		Pakuncen	Krotok		
1	2	3	4	5	6
1	Belum Bekerja	105	47	152	11,394 %
2	Tidak Bekerja	42	16	58	4,347 %
3	Pelajar	169	103	272	20,389 %
4	Mahasiswa	4	-	4	0,299 %
5	Mengurus Rumah Tangga	148	101	249	18,665 %
6	Pembantu Rumah Tangga	5	-	5	0,374 %
7	Buruh Bangunan	1	1	2	0,149 %
8	Buruh Harian Lepas	38	5	43	3,223 %
9	Buruh Swasta	14	15	29	2,173 %
10	Buruh Tani	24	50	74	5,547 %
11	Petani	64	14	78	5,847 %
12	Pedagang	38	36	74	5,547 %
13	Tukang Batu	14	41	55	4,122 %
14	Tukang Cukur	1	-	1	0,074 %
15	Tukang Kayu	2	2	4	0,299 %
16	Tukang Patri	1	-	1	0,074 %
17	Wiraswasta	17	4	21	1,574 %
18	Karyawan Swasta	60	30	90	6,746 %
19	Pelayaran	1	-	1	0,074 %
20	Karyawan BUMN	6	-	6	0,449 %
21	TKI	3	5	8	0,599 %
22	TKW	15	2	17	1,274 %
23	Rias Pengantin	1	-	1	0,074 %
24	Dukun Bayi	2	-	2	0,149 %
25	Sopir	4	2	6	0,449 %
26	Kondektur	2	-	2	0,149 %
27	Ojek	8	1	9	0,674 %
28	Penjahit	3	1	4	0,299 %
29	Perangkat Desa	8	-	8	0,599 %
30	Guru	5	3	8	0,599 %
31	Perawat	2	-	2	0,149 %
32	TNI	5	-	5	0,374 %
33	POLRI	2	1	3	0,224 %
34	PNS	16	1	17	1,274 %
35	Pensiunan	16	7	23	1,724 %
Jumlah		846	488	1334	100,000 %

c. Jumlah Penduduk Usia 5 Tahun Ke atas dirinci Menurut Tingkat Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah Penduduk Per Dusun		Jumlah	Prosentase
		Pakuncen	Krotok		
1	2	3	4	5	6
1	Belum Sekolah	0	0	0	0,000 %
2	Tidak Sekolah	1	0	1	0,083 %
3	SD Tidak Lulus	61	64	125	10,382 %
4	Belum Tamat SD	100	49	149	12,375 %
5	SD	199	198	397	32,973 %
6	Belum Tamat SLTP	46	11	57	4,734 %
7	SLTP Tidak Tamat	17	0	17	1,411 %
8	SLTP	156	52	208	17,275 %
9	Belum Tamat SLTA	20	6	26	2,159 %
10	SLTA Tidak Tamat	1	1	2	0,166 %
11	SLTA	119	61	180	14,950 %
12	D 1	5	1	6	0,498 %
13	D 2	3	1	4	0,332 %
14	D 3	12	0	12	0,996 %
15	S 1	17	2	19	1,578 %
16	S 1 Tidak Tamat	1	0	1	0,083 %
Jumlah		758	446	1.204	100,000 %

C). PEMERINTAHAN DESA

a. Perangkat Desa

Jumlah perangkat desa dirinci menurut tingkat pendidikan :

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah	Prosentase
1	2	3	4
1	Tamat SD	2	25,000 %
2	SLTP Tidak Tamat	1	12,500 %
3	Tamat SLTP	1	12,500 %
4	Tamat SLTA	4	50,000 %
5	Sarjana Muda	-	0 %
6	Sarjana	-	0 %
Jumlah		8	100,000 %

b. Badan Perwakilan Desa

Jumlah anggota BPD dirinci menurut tingkat pendidikan :

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah	Prosentase
1	2	3	4
1	Tamat SD	3	60,000 %
2	Tamat SLTP	1	20,000 %
3	Tamat SLTA	1	20,000 %
Jumlah		5	100,000 %

c. Lembaga Kemasyarakatan Desa

Jumlah anggota lembaga kemasyarakatan desa dirinci menurut tingkat pendidikan :

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah Anggota				Jumlah	Prosentase
		LKMD	RW	RT	PKK		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Tidak Tamat SD	-	-	1	-	1	3,333 %
2	Tamat SD	-	2	6	3	11	36,666 %
3	Tamat SLTP	1	-	1	4	6	20,000 %
4	Tamat SLTA	3	-	2	5	10	33,333 %
5	D 2	-	-	-	1	1	3,333 %
6	D 3	-	-	-	1	1	3,333 %
J u m l a h		4	2	10	14	30	100,000 %

d. Tanah Bengkok

Luas tanah bengkok dirinci menurut nama perangkat desa

No	Nama Perangkat Desa	Luas (Ha)	Pemanfaatan (Ha)	Prosentase
1	2	3	4	5
1	Malno	4,959	3,837	39,790 %
2	Mahmudin	1,660	1,660	17,214 %
3	Abdul Latif	1,165	1,165	12,081 %
4	Setyo Pamungkas	0,710	0,710	7,362 %
5	Salikin	0,710	0,710	7,362 %
6	Nikun Putra	0,710	0,710	7,362 %
7	M. Sholeh	0,451	0,451	4,676 %
8	Miskam	0,400	0,400	4,148 %
J u m l a h		10,765	9,643	99,995 %

e. Tanah Kas Desa

Luas tanah kas desa dirinci menurut kondisi lahan dan pemanfaatannya

No	Tanah Kas Desa	Luas (Ha)	Pemanfaatan
1	2	3	4
1	Sawah	1,171	Disewa tahunan selama 2 tahun Yaitu tahun 2009 dan tahun 2010 sebesar Rp.7.025.000,- dananya untuk pembangunan rolak jalan Dusun Krotok dan papingisasi jalan makam Desa Pakuncen
2	Lahan Kering	-	-
J u m l a h		1,171	

d). SOSIAL

a. Keagamaan

Jumlah penduduk dirinci menurut agama

No	Agama	Jumlah Penduduk Per Dusun				Jumlah	Prosentase
		Dusun Pakuncen		Dusun Krotok			
		Laki-laki	Perempuan	Laki-laki	Perempuan		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Islam	404	442	233	247	1326	99,400 %
2	Kristen	-	-	4	4	8	0,600 %
3	Katolik	-	-	-	-	-	-
4	Budha	-	-	-	-	-	-
5	Hindu	-	-	-	-	-	-
Jumlah		404	442	237	251	1334	100,000 %

Jumlah sarana peribadatan

No	Sarana Peribadatan	Jumlah Sarana Peribadatan Per Dusun		Jumlah
		Dusun Pakuncen	Dusun Krotok	
1	2	3	4	5
1	Masjid	2	1	3
2	Mushola	-	1	1
3	Gereja	-	-	-
4	Kuil	-	-	-
5	Pura	-	-	-
Jumlah		2	2	4

Pernikahan, Perceraian dan Rujuk

No	Uraian	Jumlah Pernikahan, Perceraian, dan Rujuk Per Dusun		Jumlah
		Dusun Pakuncen	Dusun Krotok	
1	2	3	4	5
1	Jumlah Pernikahan	15	2	17
2	Jumlah Perceraian	3	-	3
3	Jumlah Rujuk	1	-	1
Jumlah		19	2	21

b. Pendidikan

Kondisi Pendidikan Masyarakat

No	Uraian	Jumlah
1	2	3
1	Taman Kanak-kanak	1
2	Siswa Taman Kanak-kanak	38
3	Sekolah Dasar	1
4	Siswa Sekolah Dasar	128
5	Anak Usia 7 – 15 Tahun yang tidak sekolah	0
6	Anak SD yang dropt out	0
7	Anak SD yang tinggal kelas	0
8	Lulusan SD yang melanjutkan ke SLTP	19

c. Kesehatan

No	Uraian	Jumlah Per Dusun		Jumlah
		Dusun Pakuncen	Dusun Krotok	
1	2	3	4	5
1	Kader Posyandu	6	5	11
2	Anggota Kelompok Donor Darah	15	27	42

3	Anggota Ambulan Desa	2	3	5
4	Jumlah Bayi Lahir Hidup	21	9	30
5	Jumlah Kelahiran Bayi yang ditolong Bidan	21	9	30
6	Jumlah Kelahiran Bayi yang ditolong Dukun Bayi	-	-	-
7	Jumlah Kematian Bayi (umur 0 - 1 th)	-	-	-
8	Jumlah Kematian Balita (umur > 1 th - 5 th)	-	-	-
9	Jumlah Kematian Ibu	-	-	-

d. Keluarga Berencana

No	Uraian	Jumlah
1	2	3
1	Pasangan Usia Subur (Perempuan Usia 15 th s/d 49 th) Sudah Nikah	202
2	Wanita Usia Subur (Perempuan Usia 15 th s/d 49 th) Belum Nikah/janda	352
3	Peserta KB MOP	8
4	Peserta KB MOW	29
5	Peserta KB IUD / Spiral	0
6	Peserta KB Kondom	3
7	Peserta KB Implan / Susuk	10
8	Peserta KB Suntik	88
9	Pserta KB Pil	24

e). KONDISI EKONOMI

a. Transportasi dan Komunikasi

No	Uraian	Jumlah
1	2	3
1	Panjang jalan desa kondisi baik (km)	1,600
2	Panjang jalan desa kondisi rusak (km)	1,470
3	Jumlah jembatan desa kondisi baik	2
4	Jumlah jembatan desa kondisi rusak	-
5	Jumlah Kendaraan Roda 4	9
6	Jumlah kendaraan roda 2	96
7	Jumlah Wartel	0
8	Jumlah Televisi	146
9	Jumlah Radio	76

b. Perdagangan

No	Uraian	Jumlah
1	2	3
1	Pasar Umum	-
2	Pasar Hewan	-
3	Toko / Warung	32
4	Warung Makan	-
5	Toko Besi / Bangunan	-
6	Kios Saprotan	8
7	Koperasi	1
8	Bank	-
9	BMT	-

c. Pertanian

Luas tanaman dan produksi Tahun 2009

No	Komoditas	Luas Tanam (Ha / Batang)	Produksi (Ton)
1	2	3	4
1	Padi	55,505	277/ tahun
2	Jagung	2	6/ tahun
3	Ubi Jalar	-	-
4	Ubi Kayu	3	34/ tahun
5	Kacang Panjang	-	-
6	Cabe	6	36/ tahun
7	Pisang	1	20/ tahun
8	Klengkeng	-	-
9	Sukun	-	-
10	Manggis	-	-
11	Durian	-	-
12	Salak	1,5	5/ tahun
13	Kelapa	1	37.500 biji/ tahun
14	Kopi	-	-
15	Cengkih	-	-
16	Panili	-	-

Populasi Ternak Tahun 2009

No	Tenak	Jumlah
1	2	3
1	Sapi Perah	-
2	Sapi Biasa	2
3	Kerbau	22
4	Kambing	10
5	Kuda	-
6	Domba	-
7	Ayam Kampung	410
8	Ayam Petelur	-
9	Ayam Pedaging	-
10	Itik	261
11	Kolam Ikan	125

d. Industri dan Kerajinan

No	Jenis	Jumlah Pengusaha / Pengrajin
1	2	3
1	Makanan Olahan / tempe	3 orang
2	Pembuatan mebel	1 orang

2. PERMASALAHAN DESA

a. Kesehatan

1. Masyarakat kebanyakan kurang terjaga kesehatannya itu terjadi antara lain dikarenakan Tidak optimalnya masyarakat memanfaatkan sarana dan prasarana yang ada didesa dan minimnya ekonomi/ taraf hidup sebagian masyarakat sehingga kurang memperhatikan cara hidup sehat;
2. Tidak tersedianya tempat pembuangan sampah sehingga masyarakat membuang sampah disembarang tempat, sampah banyak berserakan dilingkungan masyarakat bahkan disekitar pemukiman yang bisa menimbulkan penyakit;

3. Tidak adanya saluran drainase yang teratur sehingga sampah rumah tangga dialirkan tak beraturan bisa menimbulkan bau dan penyakit di masyarakat.

b. Pendidikan

Mayoritas masyarakat pendidikannya masih rendah , kebanyakan lulusan SD dan SLTP dikarenakan kurangnya kesadaran dari masyarakat tentang pendidikan dan minimnya ekonomi sebagian masyarakat sehingga kurang memperhatikan tentang pendidikan..

c. Ketenagakerjaan

Minimnya pendidikan dan ketrampilan dari masyarakat sehingga kalah bersaing dalam dunia kerja mengakibatkan banyak terdapat pengangguran.

d. Industri Rumah Tangga dan Industri Kecil

Industri Rumah Tangga dan Industri Kecil ada di desa namun tidak berlangsung cukup lama, karena kalah bersaing dalam permodalan dan pemasaran disamping hal tersebut daya beli masyarakat juga kurang disebabkan kondisi ekonomi yang pas-pasan .

e. Sektor Pertanian

Sebagian besar masyarakat hidup dari pertanian, walaupun sudah ada kelompok tani, namun masyarakat masih ragu dengan cara bertanam yang dicontohkan pemerintah melalui PPL Pertanian kecenderungan cara bertani dan pengolahan tanah masih tradisional sehingga kurang baik dalam hasil panen pertanian, perlu diadakannya pendidikan dan pelatihan pertanian serta manajemen pertanian.

f. Infrastruktur

Dalam proses pembangunan Infrastruktur sudah melalui musyawarah mufakat dan pelaksanaannya juga dilaksanakan oleh Tim Pelaksana Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat. Didesa telah diadakan pembangunan saluran air bersih yang bersumber dari mata air yang disalurkan ke rumah warga, baik untuk dusun Pakuncen maupun Dusun Krotok, namun khusus untuk Dusun Pakuncen masih terdapat kendala yaitu air mengalir kurang besar/ lancar sehingga masyarakat kurang merasa puas dengan kondisi saat ini.

g. Permasalahan Lingkungan Hidup

Lingkungan desa Pakuncen agak sulit dalam program pengembangan desa, itu disebabkan lokasi desa yang dikelilingi sungai dan tanah bengkok, untuk mengadakan pemekaran desa harus diadakan tukar guling tanah bengkok, sehingga tanah menjadi milik pribadi masyarakat dan bisa diadakan pemekaran desa. Kondisi lingkungan antar rumah di desa sudah agak sempit mulai jarang adanya lahan kosong maupun kebun sehingga masyarakat mengalami kesulitan dalam membuang sampah. Kalau hal tersebut dibiarkan masyarakat lalu membuang sampah akhirnya di sungai-sungai dan itu sangat mengganggu lingkungan dan kesehatan buat kita juga lahan pertanian bagi masyarakat. Upaya untuk menanggulangi masalah sampah tersebut adalah dengan dibangunnya TPS (Tempat Penampung Sementara sampah), namun karena ekonomi masyarakat yang rata-rata masih rendah sehingga menyulitkan dalam pengangkutan sampah dari TPS ke TPA (Tempat Pembuangan Akhir) yang tentunya membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Selain hal tersebut diatas, permasalahan pembuangan sampah rumah tangga juga menjadi masalah yang amat rumit. Tidak adanya saluran drainase yang pokok sehingga masyarakat mengalirkan sampah rumah tangga dengan cara membuat saluran sendiri-sendiri yang pada akhirnya bisa menimbulkan bau yang tidak sedap yang dapat mengganggu lingkungan serta kesehatan masyarakat.

h. Penyelenggaraan Pemerintahan

Penyelenggaraan pemerintah berjalan cukup baik, namun belum maju seperti yang diharapkan, itu dikarenakan SDM (Sumber Daya Manusia) dari aparat pemerintah Desa dan lembaga Desa yang mayoritas lulusan SD dan SLTP. Sehingga perlu diadakannya pelatihan – pelatihan dan pendidikan tentang pemerintahan kepada aparat pemerintah dan lembaga yang ada.

B. STRATEGI PEMBAGUNAN DESA

a) Strategi

Agar partisipasi masyarakat sebagai salah satu prasyarat bagi tegaknya sistem pemerintahan yang demokratis dapat berjalan optimal, pemerintah desa memberikan kebebasan kepada masyarakat untuk menyampaikan saran, kritik, pikiran dan pendapat guna meningkatkan derajat kesejahteraan masyarakat.

C. MAKSUD DAN TUJUAN PENYUSUNAN RKP DESA

Maksud penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP Desa) tahun 2010 adalah menjabarkan RPJM Desa kedalam perencanaan pembangunan tahunan yang memuat prioritas pembangunan desa, rencana kerja dan pendanaan yang bersifat indikatif sebagai dasar penyusunan APB Desa tahun 2010, Sedangkan tujuannya antara lain :

1. Menselaraskan dan mensinergikan dengan sistem perencanaan pembangunan kabupaten, provinsi dan Pusat;
2. Menselaraskan dan mensinergikan pembiayaan pembangunan desa dari berbagai sumber pembiayaan.

D. SISTEMATIKA PEYUSUNAN RKP DESA

1. BAB I : PENDAHULUAN
2. BAB II : KERANGKA ANGGARAN DESA
3. BAB III : PRIORITAS PEMBAGUNAN DESA
4. BAB IV : RENCANA KERJA DAN BIAYA
 - A. RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DESA APB DESA
 - B. RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DESA APBD KABUPATEN
 - C. RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DESA APBD PROVINSI DAN APBN
 - D. RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DESA SWADAYA MASYARAKAT
5. BAB V : PENUTUP

BAB II
KERANGKA ANGGARAN DESA

- A. ANGGARAN DESA TAHUN BERJALAN
1. Realisasi Anggaran Pendapatan Desa Tahun 2009

No	Uraian Pendapatan	Jumlah (Rp)
1	2	3
1.	<i>Pendapatan Asli Desa</i>	<i>61.058.200</i>
1.1	Hasil usaha desa	0
1.2	Hasil kekayaan desa	29.425.000
1.3	Hasil swadaya dan partisipasi	6.187.200
1.4	Hasil gotong royong	19.410.000
1.5	Hasil pajak desa	0
1.6	Hasil retribusi desa	6.036.000
1.7	Hasil bunga deposito / simpanan desa	0
1.8	Lain-lain pendapatan asli desa yang sah	0
2	<i>Bagi hasil pajak Desa kabupaten dan retribusi Desa kabupaten</i>	<i>0</i>
2.1	Bagi hasil pajak Desa kabupaten	0
2.2	Bagi hasil retribusi Desa kabupaten	0
3	<i>Bagian dana perimbangan keuangan pusat dan Desa kabupaten</i>	<i>120.626.700</i>
3.1	Alokasi dana desa (ADD)	120.626.700
4	<i>Bantuan keuangan dari pemerintah, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten</i>	<i>131.559.750</i>
4.1	Bantuan Pemerintah	46.159.750
4.2	Bantuan Pemerintah Provinsi	5.000.000
4.3	Bantuan Pemerintah Kabupaten	80.400.000
5	<i>Hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat</i>	<i>0</i>
5.1	Hibah	0
5.2	Bantuan keuangan	0
Jumlah Anggaran Pendapatan Desa		313.244.650

2. Realisasi Anggaran Belanja Desa Tahun 2009

No	Uraian Belanja Desa	Jumlah
1	2	3
1	Belanja Tidak Langsung	
1.1	Belanja Pegawai / Personalia	86.398.000
1.2	Belanja Bunga	0
1.3	Belanja Subsidi	0
1.4	Belanja Hibah	3.300.000
1.5	Belanja Bantuan Sosial	2.000.000
1.6	Belanja Bagi Hasil	0
1.7	Belanja Bantuan Keuangan	0
1.8	Belanja Tidak Terduga	0
Jumlah Belanja Tidak Langsung		91.698.000
2	Belanja Langsung	
2.1	Belanja Pegawai	38.148.350
2.2	Belanja Barang dan Jasa	40.465.750
2.3	Belanja Modal	145.084.750
Jumlah Belanja Langsung		223.698.850
Jumlah Belanja Desa		315.396.850

No	Uraian Pembiayaan Desa	Jumlah (Rp)
1	2	3
1	Penerimaan Pembiayaan	
1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SiLPA)	3.003.450
1.2	Pencairan Dana Cadangan	0
1.3	Hasil Penjualan Kekayaan Desa yang dipisahkan	0
1.4	Penerimaan Pinjaman Desa	0
1.5	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	0
1.6	Penerimaan Piutang Desa	0
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	0
2	Pengeluaran Pembiayaan	
2.1	Pembentukan Dana Cadangan	2.152.200
2.2	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Desa	0
2.3	Pembayaran Pokok Hutang	0
2.4	Pemberian Pinjaman Desa	0
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	2.152.200
	Pembiayaan Netto	0
	Sisa Lebih Pembiayaan anggaran tahun berkenan (SILPA)	851.250

B. PAGU ANGGARAN

Dalam rangka penyusunan dokumen perencanaan pembangunan jangka pendek / tahunan di tingkat desa, guna memenuhi ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2005 tentang Desa dan Peraturan Desa Kabupaten Wonosobo No ... tahun 2008 tentang Perencanaan Pembangunan, maka perlu dipaparkan tentang kerangka anggaran desa. Kerangka anggaran itu, selanjutnya diformulasikan dalam bentuk pagu indikatif anggaran desa.

Pagu indikatif anggaran desa Pakuncen antara lain meliputi;

1. Pagu indikatif anggaran desa Pakuncen untuk tahun 2010 dengan mengacu APB Desa tahun 2009.
2. Pagu indikatif anggaran desa Pakuncen belum termasuk memperhitungkan sumber-sumber pendapatan desa yang lain seperti bagian dari pajak dan retribusi kabupaten, bantuan keuangan pemerintah dan propinsi, kenaikan dan penurunan ADD dan sebagainya.
3. Pagu indikatif anggaran desa Pakuncen disusun dengan menggunakan pendekatan penganggaran secara terpadu dan berbasis kinerja.

Penyusunan penganggaran secara terpadu dilakukan dengan mengintegrasikan seluruh proses perencanaan dan penganggaran desa, sehingga menghasilkan dokumen RKP Desa. Sedangkan penyusunan berbasis kinerja dilakukan dengan memperhatikan keterkaitan antara pendanaan dengan keluaran serta hasil yang diharapkan termasuk efisiensi dalam pencapaian hasil dan keluaran tersebut. Dalam penyusunan anggaran berbasis kinerja diperlukan indikator kinerja, standar biaya, evaluasi kinerja dari setiap program dan kegiatan. tingkat kegiatan yang ditetapkan pada awal siklus anggaran menjadi dasar untuk menentukan anggaran pada tahun yang direncanakan dan untuk menentukan anggaran pada tahun yang direncanakan dan prakiraan satu tahun kedepan bagi program yang bersangkutan.

C. NORMA, PRINSIP ANGGARAN DESA

1. Norma Anggaran

Norma anggaran pada dasarnya merupakan aturan dasar dari manajemen pengelolaan keuangan desa yang harus diikuti agar amanat yang diberikan oleh rakyat dapat dicapai. Aturan dasar dalam pengelolaan keuangan desa antara lain meliputi;

- a. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 35851);

- b. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- c. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
- d. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
- e. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- f. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
- g. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- h. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
- i. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
- j. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2006 Nomor 9 Seri E Nomor 6);
- k. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 11 Tahun 2006 tentang Alokasi Dana Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2006 Nomor 12 Seri E Nomor 9);
- l. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 3 Tahun 2008 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa
- m. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 4 Tahun 2008 tentang Perencanaan Pembangunan Desa
- n. Peraturan Desa Pakuncen Nomor 050/ 230/ 2009/ IX/ 2006 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Pakuncen (RPJM Desa) Tahun 2006 - 2010

2. Prinsip Anggaran

Prinsip anggaran adalah nilai-nilai dasar dan kaidah yang harus dijadikan pedoman sehingga anggaran desa dapat dilaksanakan dengan baik. Prinsip-prinsip anggaran tersebut meliputi :

a. Komprehensif dan Disiplin.

Anggaran desa adalah satu-satunya mekanisme yang akan menjamin terciptanya disiplin pengambilan keputusan, anggaran Desa harus disusun secara komprehensif, yaitu menggunakan pendekatan yang holistik dalam diagnosis permasalahan yang dihadapi, analisis keterkaitan antar masalah yang mungkin muncul, evaluasi kapasitas kelembagaan dan pemecahan masalah dengan menggunakan cara-cara yang dapat diterima oleh semua pihak.

b. Fleksibilitas

Keleluasaan Desa dalam menyusun anggaran yang memadai sesuai dengan ketersediaan informasi-informasi relevan yang dimiliki dan arahan kabupaten serta inisiatif dan prakarsa masyarakat Desa.

c. Terprediksi

Kebijakan yang terprediksi adalah faktor penting dalam peningkatan kualitas implementasi anggaran Desa. Sebaliknya bila kebijakan sering berubah-ubah maka Desa akan menghadapi ketidak-pastian dalam pelaksanaan suatu program yang didanai oleh anggaran Desa.

d. Kejujuran

Kejujuran tidak hanya menyangkut moral dan etika manusianya tetapi juga menyangkut keberadaan bias proyeksi penerimaan dan pengeluaran. Sumber bias yang memunculkan ketidakjujuran ini dapat berasal dari aspek teknis dan politis. Proyeksi yang terlalu optimis akan mengurangi kendala anggaran sehingga memungkinkan munculnya inefisiensi dan inefektivitas pelaksanaan kebijakan-kebijakan yang sangat diprioritaskan.

e. Informatif

Informatif adalah basis kejujuran dan proses pengambilan keputusan yang baik, karenanya pelaporan yang teratur tentang biaya, output dan dampak suatu kebijakan adalah memegang peran yang sangat penting.

f. Transparansi

Transparansi adalah keterbukaan dalam proses perencanaan, penyusunan dan pelaksanaan anggaran Desa, transparansi memberikan arti bahwa anggota masyarakat memiliki hak dan akses yang sama untuk mengetahui proses anggaran karena menyangkut aspirasi dan kepentingan masyarakat, terutama pemenuhan kebutuhan-kebutuhan hidup masyarakat.

g. Akuntabilitas

Akuntabilitas adalah prinsip pertanggungjawaban publik yang berarti bahwa proses penganggaran mulai dari perencanaan, penyusunan dan pelaksanaan harus benar-benar dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.

Masyarakat tidak hanya memiliki hak untuk mengetahui anggaran tersebut tetapi berhak pula untuk menuntut pertanggungjawaban atas rencana ataupun pelaksanaan anggaran.

h. Ekonomi, Efisiensi dan Efektivitas

Ekonomi berkaitan dengan pemilihan dan penggunaan sumberdaya dalam jumlah dan kualitas tertentu pada harga yang paling murah.

Efisiensi berarti penggunaan dana masyarakat dapat menghasilkan output yang maksimal.

Efektivitas berarti penggunaan anggaran tersebut harus mencapai target / tujuan kepentingan publik.

BAB III PRIORITAS PEMBANGUNAN DESA

Prioritas pembangunan desa tahun 2010 dirumuskan berdasarkan arahan kebijakan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) dan menyesuaikan dengan prioritas pembangunan Kabupaten Wonosobo untuk tahun 2010. Berdasarkan analisis masalah dan aspirasi yang berkembang di masyarakat, maka prioritas pembangunan desa Pakuncen tahun 2010 diarahkan untuk :

1. Penanganan Kemiskinan

Penanganan kemiskinan di desa pada dasarnya untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat yang meliputi; pendidikan, kesehatan, dan pemenuhan pekerjaan.

a. Pendidikan

Prioritas bidang pendidikan pada tahun 2010 diarahkan untuk mendukung upaya penuntasan wajar dikdas 9 tahun dan penuntasan buta aksara serta peningkatan derajat pendidikan masyarakat antara lain dengan memberikan bea siswa kepada murid berprestasi dan tidak mampu, pemberian bantuan kegiatan pendidikan non formal serta Pembinaan forum masyarakat peduli pendidikan.

b. Kesehatan

Prioritas bidang kesehatan diarahkan untuk mendukung upaya peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dengan membangun kesiapsiagaan masyarakat dibidang kesehatan. Dengan pengoptimalkan pemanfaatan sarana prasarana kesehatan yang ada yaitu PKD (Poliklinik Desa) dan kegiatan posyandu baik Balita maupun Lansia. Selain itu juga diusahakan pembangunan saluran drainase, Serta pembangunan bak penampung sampah bagi masyarakat agar tidak membuang sampah disembarang tempat juga diadakan dana sehat desa.

c. Pemenuhan Pekerjaan

Diadakannya pelatihan perikanan, ikan pada kolam maupun mina padi. Serta peningkatan kualitas kelompok tani, dan Penyampaian informasi lowongan kerja yang ada.

2. Pengembangan Ekonomi Rakyat

Pengembangan ekonomi rakyat diprioritaskan untuk pengembangan ekonomi rakyat yang memberi insentif atau berdampak positif bagi penanggulangan kemiskinan. Pembangunan yang dilaksanakan adalah dengan memberdayakan koperasi simpan pinjam maupun kelompok-kelompok usaha serta UP2K.

3. Pembangunan Infrastruktur

Prioritas pembangunan infrastruktur pada tahun ini adalah pembangunan Drainase/ Saluran air limbah RT 4 RW I desa Pakuncen, penambahan saluran air bersih untuk dusun Krotok, Pembangunan kelanjutan Peninggian pasanagan saluran Tengah/ Siwuni dusun Krotok, Pembangunan bak sampah desa Pakuncen, Kelanjutan Papingisasi jalan ke makam desa Pakuncen, Pembangunan rumah keranda, Pembangunan peninggian jalan aspal desa Pakuncen – Selomerto, Pakuncen – Gunungtawang dan Pakuncen – Sojokerto, Rehab berat 1 ruang kelas TK pertiwi Pakuncen dan Orinair SDN Pakuncen, serta Pembenahan saluran irigasi Pertanian.

4. Penyelenggaraan Pemerintahan

Prioritas pembangunan dalam bidang penyelenggaraan pemerintahan diarahkan untuk memperkuat sistem perencanaan, mengefektifkan pelaksanaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Mengadakan BinteK peningkatan sumber daya aparatur pemerintah/ Perangkat Desa.

BAB V P E N U T U P

Penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP Desa) adalah merupakan penjabaran RPJM Desa kedalam perencanaan pembangunan tahunan yang memuat prioritas pembangunan desa, rencana kerja dan pendanaan yang bersifat indikatif sebagai dasar penyusunan APB Desa tahun 2010.

Dengan tersusunnya Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP Desa) tersebut, diharapkan akan terjadi keselarasan dan kesinergisan dengan sistem perencanaan pembangunan kabupaten dan provinsi dan juga dalam pembiayaan pembangunan desa dari berbagai sumber pembiayaan. Sehingga partisipasi masyarakat sebagai salah satu syarat bagi tegaknya sistem pemerintahan yang demokratis dapat berjalan optimal, pemerintah desa memberikan kebebasan kepada masyarakat untuk menyampaikan saran, kritik, pikiran dan pendapat guna meningkatkan derajat kesejahteraan masyarakat dan untuk menciptakan keharmonisan hubungan antara pemerintah desa dengan warg, serta terbentuk pemerintahan desa yang lebih transparan.